

Analisis Relasi Sipil-Militer Guinea Pasca Kudeta Militer Tahun 2021

Nur Allyah¹, Y. A. Wahyudin¹, Zulkarnain¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia,
83125

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia,
83125

³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia,
83125

nuralliyah15@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to provide information and understanding about civil-military relations in Guinea both before the military coup and after the military coup in 2021, as well as how the transition to democracy is in Guinea. This study uses the concept of Transitional Democracy and Praetorianism theory, namely the type of praetorian Arbitrator Army as proposed by Purlmutter and praetorian supervisors as proposed by Nordlinger. The military intervened in civilian affairs temporarily and formed a transitional government and consolidated democracy before being returned to civilians. The result of this study is that bad civil-military relations in the Alpha Conde government and the amendment changes that allowed Alpha Conde to serve as president for the third term became the trigger for the military coup, this military coup was led by colonel Mamady Doumbouya. After the military coup, civil-military relations did not experience significant changes for the better, where the military government committed many violations of democracy and human rights and the military government was unable to fulfill its promise to form a more inclusive government and better elections than before.

Keywords: Civil-Military Relations, Democracy, Guinea, Military Coup.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai relasi sipil-militer di Guinea baik sebelum terjadinya kudeta militer maupun setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 2021, serta bagaimana transisi demokrasi yang ada di Guinea. Penelitian ini menggunakan konsep Transisi Demokrasi dan teori Pretorianisme, yaitu tipe praetorian *Arbitrator Army* seperti yang dikemukakan oleh Purlmutter dan praetorian pengawas seperti yang dikemukakan oleh Nordlinger. Militer melakukan intervensi pada urusan sipil untuk sementara dan membentuk pemerintahan transisi dan konsolidasi demokrasi sebelum dikembalikan lagi kepada pihak sipil. Hasil dari penelitian ini ialah relasi sipil-militer yang buruk pada pemerintahan Alpha Conde dan perubahan amandemen yang memungkinkan Alpha Conde untuk menjabat sebagai presiden untuk periode ketiganya menjadi pemicu terjadinya kudeta militer, kudeta militer ini dipimpin oleh kolonel Mamady Doumbouya. Pasca kudeta militer relasi sipil-militer tidak mengalami perubahan signifikan kearah yang lebih baik, dimana pemerintahan militer banyak melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta pemerintah militer tidak mampu memenuhi janjinya untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif dan pemilu yang lebih baik daripada sebelumnya.

Kata Kunci: Demokrasi, Guinea, Kudeta Militer, Relasi Sipil-Militer.

PENDAHULUAN

Intervensi militer atau kudeta sering terjadi dikarenakan adanya kekacauan politik, kesenjangan sosial, pembungkaman demokrasi, hak berpendapat warga negara yang dilarang, kemiskinan yang terus meningkat dan buruknya relasi sipil-militer di sebuah negara (Christmas & Setiyono, 2019). Militer yang melakukan intervensi pada urusan sipil disebut sebagai tentara Pretorian, dimana militer bertindak sebagai kelompok yang menjalankan pemerintahan baik sementara ataupun selamanya (Garmabar, 2021). Guinea meraih kemerdekaan dan menggunakan rezim sosialis yang dipimpin oleh Ahmed Sekou Toure. Guinea sejak lama dipimpin oleh rezim otoriter yang dimulai dengan kepemimpinan Sekou Toure lalu Jenderal Lansana Conte. Guinea memiliki sejarah panjang terkait dengan kekuasaan militer dalam urusan sipil sejak memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1958. Setelah Prancis menarik seluruh pasukannya dari Guinea, terjadi kekacauan di Guinea hingga terjadinya kudeta militer (Al Jazeera, 2021).

Pemilihan presiden sebelumnya tidak melalui demokrasi dimana pada tahun 1993 Jenderal Lansana Conte yang merupakan kepala pemerintahan militer terpilih sebagai presiden pemerintahan sipil, dan terpilih kembali tanpa demokrasi pada tahun 1998 dan terpilih lagi pada tahun 2003, era kepemimpinan Jenderal Lansana Conte disebut sebagai tipe praetorian *The Ruler Army*. Keterlibatan militer dalam urusan sipil kemudian terulang lagi pada tahun 2008 setelah kematian Presiden Conte, dan Moussa Dadis Camara memimpin kudeta militer, merebut kekuasaan dan menagguhkan konstitusi serta aktivitas politik (Al Jazeera, 2021). Intervensi yang dilakukan oleh Camara termasuk pada tipe praetorian *Arbitrator Army* dimana Camara melakukan intervensi terhadap pemerintahan sebelumnya dan bertindak sebagai pemimpin pemerintahan transisi di Guinea (Praditya, 2021). Terjadi banyak protes dan pelanggaran hak asasi manusia oleh Camara sehingga kapten Camara kemudian tewas pada Desember 2009, lalu digantikan oleh Alpha Conde pada tahun 2010.

Alpha Conde menjadi presiden Guinea pertama yang terpilih secara demokratis di Guinea, yaitu pada tanggal 7 November 2010 melalui partai *Rally of the Guinea People* atau Majelis Rakyat Guinea, lalu pada tahun 2015 Alpha Conde terpilih kembali menjadi presiden untuk periode keduanya memimpin, namun pemilih tersebut tidak luput dari kekerasan dan adanya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh Alpha Conde. Selain itu, terdapat permasalahan domestik yang tidak mampu diatasi oleh presiden Alpha Conde sebagai pemimpin, seperti permasalahan sumber daya alam yang dieksploitasi (Bertelsmann Transformation Index, n.d.)

Guinea baru menjalankan transisi dari rezim otoriter sebelum-sebelumnya ke pemerintahan yang demokratis, sebagai negara demokrasi baru, Guinea mengalami banyak sekali tantangan. Negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya menghormati dan terbuka untuk segala pendapat dari warga negaranya, menghormati perbedaan etnis, ras agama, dan tingkat sosial, menghormati hak asasi manusia, dan adanya kebebasan berekspresi dalam berbagai bentuk tanpa dihantui ketakutan dan kekerasan yang akan menghampiri (Noviati, 2016).

Pada awalnya konstitusi Guinea membatasi presiden untuk berkuasa selama dua periode saja per lima tahun, namun pada tahun 2019 Alpha Conde mengumumkan rencana rancangan konstitusi yang baru, dimana partai *Rally of the Guinea People*

sebagai partai pendukung Alpha Conde mengatakan hal ini akan memungkinkan Alpha Conde mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang meskipun itu ditentang (Al Jazeera, 2021). Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketegangan politik dan etnis yang telah lama terjadi di Guinea.

Kekacauan politik ini menyebabkan terjadinya pelecehan dan penahanan suara atau pembungkaman terhadap setiap pihak yang mencoba melakukan penentangan terhadap keputusan Alpha Conde. Akan tetapi pihak Mahkamah Konstitusi tetap menandatangani dokumen amandemen konstitusi yang cacat yang kemudian disetujui dalam referendum Maret 2020 (Melly, 2020). Komisi Pemilihan kemudian membentuk pemilu non-inklusif pada Maret 2020 dengan daftar pemilih yang dianggap tidak kredibel oleh pihak oposisi. Pemilihan presiden kemudian diselenggarakan pada Oktober 2020 yang kemudian dimenangkan oleh Alpha Conde sehingga Conde menjabat untuk masa jabatan ketiganya (Melly, 2020).

Selama 20 tahun terakhir, Guinea selalu diwarnai dengan kudeta militer, pada pemerintahan Alpha Conde, relasi sipil militer tidak terlalu baik. Kudeta ini mencerminkan kegagalan demokrasi di Guinea, awalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan relasi baik antara sipil dan militer dengan melakukan reformasi untuk menciptakan profesionalisme militer (Mahendra, 2021). Pemerintah mengeluarkan kebijakan pada sektor keamanan, dalam kebijakan ini pemerintah membatasi pergerakan dari militer terutama dalam keterlibatan militer dalam permasalahan sipil dan politik, militer difokuskan di barak dan dilarang untuk melakukan hal lain selain menjaga keamanan di barak saja (Diallo, 2021).

Tahun 2011 tepatnya pada bulan Juli, terjadi penyerangan di kediaman Alpha Conde akan tetapi penyerangan ini berakhir gagal dimana seorang anggota pengawal presiden tewas dan 24 orang luka-luka. Alpha Conde lalu menangkap puluhan tentara dan beberapa warga sipil. Pada awal Agustus, jaksa agung merilis 37 nama orang yang terlibat dalam penyerangan dan sembilan diantaranya merupakan warga sipil. Akhir Agustus pihak kejaksaan mendakwa tentara yaitu Kolonel David Sylla dan pada tanggal 11 September presiden Alpha Conde mengumumkan 3 nama tambahan yaitu Tibou Kamara, mantan sekretaris jenderal Presiden, Sekkouba Konate sang wakil dari partai oposisi ternama yaitu *Union des Forces Democratiques de Guinea* (UFGD) dan Sadaka Diallo yang merupakan seorang pengusaha yang terkait dengan UFGD. Akan tetapi 3 nama tersebut tidak mampu di adili di kejaksaan, pada 19 September (Foucher, 2011).

Dua bulan pasca kejadian, masih banyak kejadian yang belum jelas terutama mengenai keterlibatan militer. Banyak yang menganggap bahwa kejadian tersebut merupakan pola yang dirancang oleh Alpha Conde untuk mempertahankan kekuasaannya dan mengurangi kekuatan militer serta menyingkirkan lawan-lawannya untuk menjaga kedudukannya. Anggapan ini dikarenakan upaya penyerangan tersebut merupakan operasi komando oleh sekumpulan tentara dengan tujuan yaitu nyawa Presiden, penyerangan ini bukan berasal dari unit militer terorganisir dengan serangkaian rencana strategis (Foucher, 2011).

Alpha Conde juga merepresif berbagai bentuk protes terhadap pemerintahannya dari berbagai pihak termasuk militer dan oposisi, sehingga mengakibatkan banyak dari mereka yang meninggal saat dipenjara. Alpha Conde juga memotong anggaran untuk militer dan kepolisian dan malah meningkatkan anggaran untuk presiden dan Majelis

Nasional. Pemilihan pada tahun 2020 diiringi dengan berbagai kekerasan hingga terjadinya krisis, masyarakat Guinea melakukan pemilihan umum pada bulan Maret setelah Alpha Conde merubah konstitusi yang memungkinkan dia untuk mengikuti pemilihan untuk periode ketiganya. Dalam pemilu ini Alpha Conde menang dengan perolehan suara sebanyak 59.9%. Hasil ini ditolak oleh masyarakat, oposisi, dan pihak militer karena Alpha Conde dianggap melakukan kecurangan yang berujung pada kudeta.

Kudeta dilakukan oleh Tentara pasukan khusus Guinea kepada pemerintahan Presiden Alpha Conde. Tentara pasukan ini di pimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya. Pasukan elit yang melakukan kudeta terhadap Alpha Conde merupakan pasukan yang diciptakan sendiri oleh Alpha Conde sendiri untuk perlindungan terhadap terorisme. Sebelumnya Kolonel Mamady Doumbouya ialah presiden *Comite National de Rassemblement et du Developpement* (CNRD) (Foucher, 2011). Pengawal kepresiden yang bernama Bataillon Autonome yang dibantu oleh pasukan pertahanan dan keamanan negara berusaha untuk mengatasi ancaman dan memukul mundur kelompok kudeta. Pasukan tentara membawa Presiden Alpha Conde ke sebuah tempat yang tidak diketahui setelah terjadinya baku tembak berjam-jam di dekat istana kepresidenan.

Pengumuman kudeta ini diumumkan langsung oleh Doumbouya di stasiun televisi negara, dalam pengumumannya Doumbouya mengatakan kudeta yang dilakukan pasukannya telah resmi menghilangkan pemerintahan beserta segala institusinya dan kemudian akan diganti dengan pemerintahan yang baru dan lebih inklusif (BBC News, 2021). Pasca kudeta militer, kolonel Doumbouya selaku pemimpin pemerintahan sementara melakukan konsolidasi dan kerjasama dengan partai-partai politik yang ada di Guinea, Lima partai besar Guinea yaitu ANAD, BOC, CPA, CPR, dan COREDE. Mereka telah menyiapkan platform antar-koalisi politik yang diluncurkan di Conakry pada 9 Oktober 2022. Kolonel Doumbouya bekerjasama dengan partai-partai politik Guinea ini untuk membentuk CNT (*National Transitional Council*) yang merupakan badan penentu durasi transisi, membentuk Majelis Nasional dan jadwal pemilu. Anggota-anggota dari CNT ini dipilih oleh kolonel Doumbouya dari berbagai partai besar di Guinea (Agence France, 2022).

Berdasarkan kegagalan demokrasi, pelanggaran-pelanggaran, dan buruknya kebijakan pertahanan yang dibuat oleh Alpha Conde dan melihat relasi sipil-militer pada masa kepemimpinan Alpha Conde, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih dalam mengenai bagaimana relasi militer-politik Guinea pasca kudeta militer pada tahun tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sam R. Bel, K. Chad Clay. Ghashia Kiyani, dan Amanda Murdie (2021) yang berjudul "*Civil-Military Relations and Human Rights*" (Bell et al., 2022). Penelitian ini membahas mengenai Bagaimana kemampuan militer yang cukup kuat dan pemerintahan yang kuat dapat melawan ancaman dari negara lain akan tetapi tidak terhadap warga sipil dalam negrinya. Sementara kurangnya control sipil terhadap militer dapat menyebabkan kudeta dan membahayakan keamanan nasional maupun internasional. Menggunakan teori Prinsipal-Agen, penelitian ini berusaha untuk mengurai prinsipal dan kepemimpinan

sipil suatu negara dalam melihat pelanggaran hak asasi manusia dari agennya yaitu pasukan militer.

Militer dan sipil merupakan dua agen atau aktor yang memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga keamanan negara, dimana kedua agen ini menjadi aktor yang harusnya melindungi keamanan rakyat khususnya melindungi setiap hak-hak masyarakat, seperti rasa aman dari ancaman kekerasan, pekerjaan yang layak, pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya. buruknya relasi sipil-militer di Guinea menyebabkan terjadinya konflik dan kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Guinea, dimana dalam ketegangan relasi sipil-militer dan dalam proses kudeta yang terjadi, diiringin dengan kekerasan bersenjata di Conarky sebagai ibu kota negara yang menimbulkan korban dari pihak sipil.

Kudeta yang terjadi juga menyebabkan ketidakstabilan sosial dimana hal ini mengganggu proses belajar mengajar, dan mempengaruhi sektor usaha di Guinea. Kudeta terjadi dikarenakan buruknya relasi sipil-militer, dimana sipil berlaku otoriter baik terhadap pihak militer maupun masyarakat biasa, dimana banyak sekali terjadi kekerasan, penghilangan orang yang melakukan protes pada pemerintahan Alpha Conde, dan meningkatnya konflik etnis dikarenakan pengaturan pemerintah yang buruk, sementara militer juga dalam tindakan kudetanya mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat seperti timbulnya rasa tidak aman, kekacauan politik, jatuhnya korban sipil, serta penutupan akses pendidikan seperti sekolah.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah sipil dan pihak militer sebagai agen atau aktor yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin keamanan dan hak asasi setiap masyarakat di Guinea telah gagal dalam menjalankan perannya, dan malah menjadi aktor yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aliyah Zainal (2013) yang berjudul "Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006". Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa kebijakan pertahanan ini telah berhasil membangun supermasi sipil dan profesionalisme militer yang baik di Chile. Tiga presiden Chile pasca transisi dari pemerintahan Pinochet yaitu Patricio Aylwin, Eduardo Frei, dan Ricardo Lagos masing-masing memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga menghasilkan perbedaan dinamika dalam relasi sipil militernya.

Aylwin menerapkan strategi *non-cooperation*, yaitu strategi yang tidak mengikut sertakan militer dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hubungan sipil-militer dan kebijakan pertahanan. Sehingga menyebabkan buruknya relasi sipil-militer. Pada era pemerintahan Eduardo Frei, presiden menerapkan strategi *engagement* dimana militer dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan yang menyebabkan baiknya relasi sipil militer. Pada era pemerintahan Ricardo Lagos, pemerintahan sipil tidak lagi mencampuri urusan militer, yang menyebabkan militer merasa aman dan hubungan sipil militer membaik.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah sipil sangat memengaruhi baik atau buruknya relasi sipil-militer di suatu negara. Di Guinea, kebijakan dari Alpha Conde yang memarginalkan pihak militer seperti pemotongan anggaran, diskriminasi terhadap pihak militer, menjatuhkan tuduhan tanpa bukti, menangkap para petinggi militer, dan lain sebagainya menyebabkan buruknya relasi antara pemerintah sipil dengan pihak militer, sehingga ketegangan yang terus terjadi membuat pihak militer memilih untuk

melakukan kudeta untuk mengakhiri kepemimpinan otoriter Alpha Conde di Guinea pada tahun 2021.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Atep A. Rofiq yang berjudul “Melacak Dinamika Sipil-Militer Pasca Revolusi Mesir” (Rofiq, 2015). Penelitian ini menjelaskan bahwa Revolusi Mesir merupakan gejolak politik yang terjadi dalam era Arab Spring, dimana revolusi ini menjadi tuntutan dari rakyat sipil Mesir yang menginginkan Husni Mubarak turun dari kedudukannya sebagai presiden karena dianggap tidak mampu untuk memimpin Mesir dengan baik. Salah satu indikator hilangnya dukungan militer terhadap Husni ialah adanya pelemahan kekuatan militer dan penguatan SS sebagai pasukan sipil yang bertugas untuk menjaga keamanan domestik untuk mengontrol para oposisi di pemerintahan. Pasca digulingkannya rezim Husni, Muhammad Mursi kemudian terpilih sebagai presiden pertama Mesir secara demokratis mengalahkan Ahmad Syafiq. Akan tetapi Mursi kemudian digulingkan oleh Jenderal El-Sisi.

Penggulingan Mursi oleh Jenderal El-Sisi tidak lepas dari kurang baiknya relasi sipil-militer di Mesir. Sama halnya juga yang terjadi di Guinea, ketidakmampuan dari pemerintah sipil untuk menjaga relasi baik dan tindakan otoriter yang dilakukan oleh Alpha Conde di Guinea menyebabkan terjadinya gejolak berupa perlawanan dari pihak militer yang merasa bahwa pemerintah sipil telah gagal dalam menjalankan pemerintahannya. Pihak militer merasa di diskriminasi dan dibatasi pergerakannya dengan alasan yang kurang kuat sementara kekuatan pemerintah sipil semakin ditingkatkan, sehingga terjadilah penggulingan kekuasaan terhadap Alpha Conde melalui kudeta militer pada tahun 2021.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andika Cahaya Utama yang berjudul “Perbandingan Kudeta 1987 dan 2006 di Fiji dalam Konteks Hubungan Sipil Militer” (Utama, 2010). Penelitian ini mengatakan bahwa dinamika hubungan sipil-militer antara kudeta tahun 1987 dan 2006 memiliki persamaan yaitu militer pada kedua kudeta tersebut mengalami intervensi oleh sipil dalam bidang yang seharusnya merupakan otoritas militer. Hal inilah yang menimbulkan kudeta, yaitu reaksi terhadap intervensi sipil pada otoritas militer.

Kudeta pada tahun 2006 kemudian memperlihatkan pola yang hampir sama dengan kudeta yang terjadi pada tahun 1987. Akan tetapi disini militer juga memanfaatkan adanya persamaan hak diantara semua etnis dan juga permasalahan korupsi untuk menjatuhkan pemerintahan Qarase. Dari segi tipe perwira preotoriannya, kedua kudeta memiliki sedikit perbedaan dimana, pada kudeta 1987 militer menaikkan status perwira preotoriannya dari moderator (kudeta Mei) menjadi guardian (kudeta September) karena tidak ingin kehilangan keunggulan yang telah didapatkan, sementara di kudeta tahun 2006 militer langsung menaikkan status ke tipe guardian.

Kudeta yang terjadi di Guinea dan Fiji memiliki kesamaan dimana kudeta terjadi karena adanya control sipil yang menyebabkan pelemahan kekuatan militer, militer dalam kedua kudeta ini juga termasuk ke dalam kategori militer modern, yaitu jenis militer yang melakukan penentangan terhadap pemerintahan sipil dan berusaha untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan.

Kudeta di Guinea dan di Fiji juga sama-sama memanfaatkan isu sosial sebagai batu loncatan untuk melakukan kudeta militer. Protes yang dilakukan masyarakat di Guinea karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan Alpha Conde yang puncaknya pada kenaikan Alpha Conde sebagai presiden setelah merubah amendemen

kepresidenan, menjadi puncak kemarahan masyarakat, dan militer memanfaatkannya sebagai momen untuk melakukan kudeta militer. Kudeta militer kemudian mendapat dukungan dari masyarakat sipil karena mereka merasa puas akan kudeta tersebut. Kesamaan lain dari kudeta militer di Guinea dan di Fiji ialah dari segi pretoriannya, yaitu termasuk pada tipe Guardian yang merupakan tipe intervensi militer secara langsung terhadap pemerintahan sipil, berusaha untuk mengubah sistem pemerintahan kearah yang lebih baik atau dengan kata lain memperbaiki sistem pemerintahan yang buruk dari pemimpin sebelumnya dan kemudian nanti akan diserahkan kembali kepada pemerintahan sipil.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mamadou Diouma Bah (Bah, 2015) yang berjudul "*The Military and Politics in Guinea: An Instrumental Explanation of Political Stability*". Penelitian ini menjelaskan mengenai mengapa Guinea tetap mampu bertahan dalam berbagai konflik bersenjata maupun intervensi militer dalam politiknya. Keterlibatan militer dalam permasalahan sipil atau pemerintahan di Guinea telah menciptakan ancaman bagi kestabilan politik dan sosialnya. Militer di Guinea telah memainkan peran yang besar dalam menjaga kestabilan politik dalam periode tahun 1984 hingga tahun 2010.

Penelitian ini mengatakan bahwa pihak militer di Guinea tidak hanya dilihat sebagai aktor yang menyebabkan instabilitas politik, terjadinya kekerasan, dan konflik dengan kudeta militer yang dilakukannya. Apabila dilihat dari segi identitas, militer memiliki peran yang besar dalam membentuk stabilitas khususnya stabilitas sosial, yaitu dengan membentuk kekompakan dan kebersatuan di setiap etnis yang ada di Guinea yang disebut dengan identitas bersama, hal ini kemudian meningkatkan persatuan dan kekuatan di Guinea. Dengan ini dapat dikatakan bahwa militer tidak hanya menjadi agen yang menjadi ancaman terhadap pemerintahan sipil tetapi juga sebagai agen yang memberikan kontribusi terhadap persatuan dan kesatuan sosial di Guinea yang memiliki banyak perbedaan suku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian dengan sifat *interpretative* karena data hasil dari penelitian berkaitan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Rahardjo, 2010). Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, mereduksi data untuk memilah hal-hal pokok serta merangkum, menyajikan data dengan uraian panjang untuk menjelaskan setiap variabel dan kaitannya, kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dan jawaban dari pertanyaan penelitian atau fenomena yang terjadi, dengan dua variabel yaitu independen dan dependen serta menggunakan teori sebagai lensa untuk melihat fenomena yang diteliti, dimana penulis menggunakan teori pretorianisme.

KERANGKA PEMIKIRAN

KONSEP TRANSISI DEMOKRASI

Joseph Schumpeter dalam buku klasiknya yang berjudul "*Capitalism, Socialism, and Democracy*" (2012) mengatakan bahwa demokrasi merupakan kehendak dari rakyat (sumber) dan kebaikan bersama (tujuan). Secara sederhana, Schumpeter

mengatakan bahwa demokrasi merupakan mekanisme untuk melakukan pemilihan dan untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur, dan periodical dimana para kandidat bebas bersaing untuk memperebutkan suara dan semua pendukung yang sudah memenuhi persyaratan umur memiliki hak untuk melakukan pemilihan pemimpin (Schumpeter, 2012)

Pada tingkatan sederhana, Huntington mensyaratkan 3 hal dalam demokrasi, yaitu (1) Berakhirnya rezim otoriter; (2) Dibangunnya rezim demokrasi; dan (3) Pengkonsolidasian rezim demokratis (Schumpeter, 2012). Di Guinea, demokrasi baru tercipta pada tahun 2010 sejak kemerdekaannya tahun 1985, dimana pada masa itu Guinea dipimpin dibawah rezim otoriter dengan beberapa pemimpin sebelumnya. Penerapan demokrasi di Guinea masih sangat jauh dari kata sesuai, rezim Alpha Conde sebagai pemimpin pertama yang terpilih melalui demokrasi malah menjalankan pemerintahan dengan nuansa yang otoriter. Banyak pembungkaman publik, kekerasan terhadap demonstran, pelanggaran HAM, pelarangan untuk berkumpul, menyuarakan pendapat dan lain sebagainya (Nurhadi, 2020).

Pasca Alpha Conde digulingkan pada tahun 2021, pemerintahan militer sementara berkuasa, mereka berjanji akan memperbaiki demokrasi yang rusak pada masa kepemimpinan Alpha Conde, akan tetapi hal ini tidak tercapai, protes yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan militer diatasi dengan cara kekerasan, media dibungkam, serta pelarangan untuk menyampaikan aspirasi dan perbedaan pendapat. Berdasarkan pendapat Huntington mengenai 3 syarat demokrasi dalam sebuah negara, Guinea belum memenuhi persyaratan tersebut, dimana pasca jatuhnya rezim otoriter dan dibentuknya rezim demokrasi, pengkonsolidasian demokrasi belum tercapai. Dimana konsolidasi demokrasi merupakan tahap penting yaitu pemimpin dan elit sipil harusnya meyakini demokrasi menjadi satu-satunya aturan main yang berlaku, bukan dengan cara kekerasan, dan bukan dengan menolak berbagai pendapat dan protes oleh warga negara.

TEORI PRETORIANISME

Praetorian merupakan campur tangan pihak militer terhadap urusan sipil atau politik. Teori Pretorianisme yang dikemukakan oleh Nordlinger mengatakakan bahwa pretorianisme merupakan situasi dimana tentara mendominasi urusan sipil secara langsung menggunakan kekuasaan dan kemampuannya. Nordlinger juga mengatakan bahwa militer merupakan lambang dari kedaulatan negara untuk menahan serangan baik dari luar maupun dari dalam terhadap negara serta semua angkatan bersenjata memiliki pengaruh dalam politik yang besar (Nordlinger, 1990).

Amos Perlmutter mendefinisikan praetorian sebagai situasi dimana militer memiliki kekuasaan politik yang otonom dalam masyarakat dengan menggunakan kekuatan ancaman. Amos kemudian membagi praetorian kedalam 2 jenis yaitu historis dan modern. Praetorian historis merupakan tentara yang ada sejak zaman romawi dan selalu mendesak calon pemimpin untuk disetujui oleh senat. Tentara menjadi alat utama untuk menunjang kekuasaan raja atau bangsawan. Sementara praetorian modern merupakan jenis praetorian yang menentang penguasa dan menawarkan kekuasaan baru (Perlmutter, 1977).

Amos Perlmutter dalam karyanya yang berjudul *The Military and Politics in Modern Times* mengklasifikasikan pretorianisme kedalam tiga kategori, yaitu tentara

sebagai wasit atau *arbitrator army*, tentara yang memerintah atau *the ruler army*, dan tentara revolusioner profesional (Perlmutter, 1984). *Arbitrator army* merupakan jenis militer yang berorientasi pada sipil dan nantinya akan kembali ke tugas militernya, dimana setelah militer terlibat dalam politik, militer akan kembali ke ranah fungsinya akan tetapi tidak akan sepenuhnya kembali menjadi profesional murni. Militer kembali tidak sepenuhnya menjadi profesional murni tetapi akan aktif menjadi kelompok yang menekan agar korporasi militer tidak akan dapat dirugikan oleh pihak sipil.

The ruler army merupakan militer yang menjadi alternatif satu-satunya dalam mencegah ketidakstabilan politik oleh pemerintahan sipil, sehingga militer menganggap bahwa mereka merupakan pihak yang paling pantas untuk memerintah selamanya. Sementara itu, tentara revolusioner profesional merupakan militer yang lahir selama masa revolusi sebagai proses persenjataan seluruh bangsa. Hal ini kemudian mengakibatkan militer tidak mampu melaksanakan persyaratan profesionalisme, seperti keahlian, pendidikan, dan latihan untuk korps militer. Militer bahkan banyak yang sama sekali tidak bermaksud untuk menjadi militer akan tetapi mereka mendapat panggilan bangsa untuk bergabung sehingga mereka terpaksa masuk. Hal ini menyebabkan militer tidak memiliki kepentingan korporasi sendiri, dan bersifat anti korporasi karena selalu mengidentika negara sebagai tentara revolusi (Perlmutter, 1984).

Berdasarkan pandangan dari Amos Perlmutter ini, kudeta militer yang terjadi di Guinea termasuk dalam jenis praetorian *modern*, dimana tentara bukan menjadi alat utama yang menunjang kekuasaan seperti pada jenis praetorian historis, melainkan tentara menjadi kelompok yang menentang penguasa atau presiden dan berusaha untuk menciptakan perubahan dan sistem pemerintahan. Pola kudeta militer di Guinea juga termasuk dalam kategori *Arbitrator army*, dimana kolonel Doumbouya yang memimpin kudeta ditunjuk sebagai pemimpin sementara sebelum pemerintahan dikembalikan kepada tangan sipil, dengan kata lain, kudeta dilakukan untuk transisi pemerintahan yaitu untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik dengan diadakannya pemilu untuk tahun 2022 dan tidak ada satupun pihak militer yang akan terlibat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di Guinea.

Nordlinger juga membagi praetorianisme menjadi 3 kategori, yaitu moderator, pengawal, dan penguasa. Praetorian moderator merupakan kategori militer yang menggunakan hak vetonya dalam perpolitikan tanpa menguasai sistem pemerintahan itu sendiri. Praetorian moderator bertindak sebagai kelompok yang memiliki pengaruh dan keterlibatan dalam politik, dalam artian walaupun pihak sipil yang memerintah, tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak akan menerima supermasi sipil.

Praetorian moderator juga lebih memilih untuk menghindari dari menguasai pemerintahan sipil, dimana mereka mencoba untuk tetap mempertahankan status quo, melaksanakan Undang-Undang Dasar dalam politik, dan tetap menjaga stabilitas politik dan pemerintahan antara kelompok-kelompok yang bersaing. Dalam hubungannya dengan pimpinan sipil, kadang kala mereka mengancam akan melakukan kudeta. Jika perlu, mereka akan mengadakan kudeta pengganti yaitu menggulingkan pemerintahan sipil lama dan menggantikannya dengan pemerintahan sipil baru yang sesuai dengan keinginan militer (Ginting, 2003).

Praetorian pengawal merupakan kelompok kedua yang merupakan mereka yang memiliki wewenang di ranah pemerintahan untuk sementara, dimana setelah mereka berhasil menggulingkan pemerintahan sipil, maka mereka akan menjadi penguasa untuk sementara sebelum adanya pemerintahan transisi. Penggulingan kekuasaan ini mereka lakukan karena tidak adanya golongan elit politik yang dianggap mampu untuk mempertahankan stabilitas politik dan ekonomi sehingga mereka merasa perlu untuk mengganti pemerintahan sipil. Praetorian pengawal mencoba untuk meningkatkan kemampuan untuk mengubah arah kebijakan pemerintahan sebelumnya, dan sebagian di antaranya cenderung melakukan perubahan sosial ekonomi dalam ukuran yang sangat minimal.

Sasaran dari praetorian pengawal meliputi pemecatan ahli politik yang sering melakukan tindak pidana korupsi dan berlaku curang dalam penyusunan kembali struktur pemerintahan dan administrasi serta pembagian kekuasaan dan fungsi ekonomi dikalangan kelompok-kelompok sipil (Ginting, 2003). Praetorian terakhir yaitu penguasa, yang merupakan kelompok praetorian yang tidak hanya menguasai pemerintahannya tetapi juga memiliki dominasi dalam rezim pemerintahan. Praetorian penguasa ini dianggap sebagai kelompok yang modernis radikal dan revolusioner dengan segala kepentingan yang mereka bawa. Kadang kala mereka mencoba untuk menguasai sebagian besar kehidupan politik, ekonomi, dan sosial melalui pembentukan struktur. Hal ini karena perubahan yang direncanakan sangat menyeluruh dan mendalam dan dengan adanya kesadaran bahwa perubahan ini akan memakan waktu yang lama, sehingga mereka akan mendominasi rezim dan pemerintahan (Nordlinger, 1990).

Melihat kategori praetorian ini, maka kelompok praetorian yang cocok membantu penelitian ini ialah praetorian pengawal. Hal ini dikarenakan kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan Alpha Conde oleh militer bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan yang dianggap tidak mampu menjaga kestabilan politik dan banyaknya pelanggaran. Militer disini hanya memiliki wewenang sementara sebelum kekuasaan dikembalikan kepada pihak sipil. Colonel Doumbouya dalam pemerintahan sementara mencopot semua jabatan-jabatan yang dipegang oleh sipil kemudian diganti oleh para perwira militer, baik di tingkatan nasional maupun di daerah-daerah yang ada di Guinea.

Teori praetorian dapat menjelaskan keseluruhan fenomena kudeta yang terjadi di Guinea dengan melihat intervensi yang dilakukan oleh pihak militer terhadap pemerintahan di Guinea dengan tujuan membentuk pemerintahan baru yang lebih inklusif dari tangan presiden otoriter Alpha Conde. Sebelumnya Guinea pernah beberapa kali di pimpin oleh pemerintahan militer akan tetapi pola yang terjadi pada pemerintahan sementara pasca kudeta militer tahun 2021 menunjukkan bahwa tipe praetorian pengawal atau *Arbitrator Army* membentuk dia relasi dengan sipil, yaitu relasi positif dan negatif. Pemerintah sementara membangun relasi positif dengan partai-partai politik besar di Guinea untuk membantunya dalam membentuk pemerintahan transisi yang lebih baik karena militer tidak memiliki banyak pengetahuan dalam menjalankan birokrasi, sementara itu pemerintahan militer sementara membangun relasi negatif dengan melakukan pembubaran terhadap NFDC (*Nation Front the Defense of the Constitution*) yang merupakan elit sipil Guinea sebagai pilar perjuangan untuk memperbaiki demokrasi di Guinea.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMERINTAHAN MILITER SEMENTARA DI GUINEA

Militer Guinea yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya melakukan intervensi pada pemerintahan sipil dan menjalankan pemerintahan militer dikarenakan ketidakpuasan militer yang menganggap bahwa pemerintahan sipil tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan politik yang ada yang di Guinea. Pada pemerintahan militer di Guinea, perwira-perwira militer ditempatkan pada posisi-posisi birokratif pemerintahan untuk menggantikan tokoh sipil lama yang dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan.

Setelah Colonel Mamady Doumbouya mengambil kendali, dia mulai melakukan diskusi dan konsultasi dengan para pemimpin politik, agama, dan bisnis pada Selasa 14 September 2021 untuk menyusun pemerintahan transisi yang sah. Kolonel Doumbouya dalam pidatonya mengatakan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan masal lalu dalam pemebentukan pemerintahan yang baru dan ingin semuanya inklusif dan berjanji untuk memerangi korupsi dan mereformasi sistem pemilu untuk mengadakan pemilu yang bebas, kredibel, dan transparan.

Dialog yang dilakukan oleh Kolonel Doumbouya berlangsung selama satu minggu. Pertemuan pertama terjadi pada hari Selasa 14 September 2021 dimana pihak militer bertemu dengan pemimpin partai politik utama di Guinea. Semua pihak diharapkan dapat membentuk kerangka kerjasama yang baik bagi pemerintahan baru, termasuk dengan menetapkan tatanan konstitusional yang tepat. Para partai politik yang melakukan dialog ini secara terbuka mendukung kudeta dan banyak mengkritik presiden Alpha Conde yang digulingkan. Pembicaraan ini berisi tentang penentuan durasi pembentukan pemerintahan transisi, reformasi politik dan kelembagaan-kelembagaan yang diperlukan dalam pemilu, dan untuk menetapkan siapa yang akan memimpin pemerintahan transisi tersebut. Pertemuan dengan pihak pemimpin politik tersebut akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan pemimpin pilitik di daerah, perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, kepala perusahaan pertambangan, pemimpin bisnis dan juga kepada diplomat (Widodo, 2021).

Colonel Doumbouya menjanjikan pembentukan pemerintahan sipil dalam kurun waktu tiga tahun, keputusan ini dimabil setelah melakukan konsultasi dan diskusi dengan semua pihak di semua tingkatan. Akan tetap hal tersebut ditentang oleh ECOWAS dan NFDC, ECOWAS memberi batas waktu untuk pembentukan pemerintahan sipil sampai tanggal 25 April 2023, dan jika tidak maka ECOWAS akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Guinea (Deutsche Welle (DW), 2022). Junta milter yang dipimpin oleh colonel Doumbouya kemudian sepakat untuk memulihkan pemerintahan sipil dalam dua tahun. Dalam hal ini para ahli dari ECOWAS dan pihak Guinea bersama-sama membentuk jadwal yang terkonsolidai untuk transisi selama dua tahun, pihak ECOWAS memeberikan junta waktu satu bulan untuk membentuk jadwal pemerintahan transisi. Dan peralihan ini dimuali pada 1 Januari 2023. Keputusan ini disetujui oleh pihak Guinea dan ECOWAS dalam pertemuanya sebelum akhir tahun 2022 (France24 English, 2022).

PEMBENTUKAN *NATIONAL TRANSITIONAL COUNCIL* (CNT)

Ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah militer di Guinea untuk membangun kepercayaan public bahwa junta militer benar-benar serius dalam usaha mengembalikan kestabilan politik di Guinea dengan membentuk lembaga yang akan mengurus permasalahan-permasalahan birokrasi dan pemilu sehingga akan menciptakan demokrasi yang lebih baik daripada sebelumnya.

Pemerintah militer kemudian membentuk 80 anggota Dewan Transisi Nasional (CNT) sebagai parlemen selama transisi Guinea ke pemilu. Pasal 77 piagam mengatakan bahwa CNT akan menentukan durasi transisi, pembentukan Majelis Nasional dan jadwal pemilu. 80 anggota TNC kemudian hadir dalam sesi pengukuhan di gedung parlemen di ibu kota Conakry. Dansa Kourouma ditunjuk sebagai Presiden CNT dan sesi pengukuhan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Transisi Mohamed Beavougi.

Sesi pengukuhan ini menjadi bentuk baiknya relasi sipil militer di Guinea, bahwa pasca kudeta militer, pihak militer dan pihak sipil bekerja sama membentuk badan-badan yang akan menjadi pilar demokrasi dan konstitusi dalam usaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih inklusif daripada pemerintahan sebelumnya.

Anggota dari Dewan Transisi Nasional (CNT) dipilih oleh kolonel Doumbouya dari daftar yang diajukan oleh partai politik dan asosiasi, yaitu untuk menyusun konstitusi baru dan menyarankan tanggal untuk peralihan ke pemerintahan sipil. Sementara itu, pemerintahan dan lembaga yang lama telah dibubarkan seperti menteri, gubernur, dan prefek diganti dengan administrator dan tentara (Agence France, 2022).

Pembubaran *Nation Front the Defense of the Constitution* (NFDC)

Nation Front for the Defense of the Constitution (NFDC) merupakan sebuah kelompok koalisi non-pemerintah yang terdiri dari aliansi partai politik, serikat pekerja dan kelompok sipil. NFDC didirikan pada April 2019 dan menjadi pejuang demokrasi yang ada di Guinea, dan merupakan pelopor utama yang melakukan protes terhadap pemerintahan Alpha Conde sebelum terjadinya kudeta militer pada tahun 2021 serta mendukung kudeta yang dilakukan oleh pihak militer.

Serangkaian demonstrasi oleh koalisi NFDC terhadap pemerintahan Alpha Conde dimulai pada Oktober tahun 2019. Namun, pasca kudea militer dilakukan, terjadi gesekan dan protes yang dilakukan oleh NFDC selama berbulan-bulan terhadap junta militer (News Wires, 2022). Puncaknya pada pengumuman NFDC dimana mereka akan melakukan demonstrasi pada 17 Agustus tahun 2022 untuk menuntut pembentukan pemerintahan sipil transisi dan pembentukan sistem demokrasi yang lebih cepat dari pada yang telah dijanjikan, menyerukan dialog yang kredibel antara pemerintah militer dan partai oposisi maupun masyarakat, serta melihat banyaknya kekerasan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah militer terhadap masyarakat di Guinea selama pemerintahan transisinya. NFDC menghadapi gencaran serangan dan intimidasi baik oleh pemerintahan Alpha Conde sebelum kudeta maupun Pemerintahan Doumbouya pasca kudeta militer (News Wires, 2022).

FNDC kemudian dibubarkan oleh pemerintah militer pada 13 Agustus 2022, pembubaran ini ditandatangani oleh Mory Conde selaku Menteri Administrasi Teritorial dan dikonfirmasi oleh AFP pada tanggal 16 Agustus 2022. Alasan dari pembubaran ini ialah adanya ancaman keamanan, perdamaian, dan persatuan nasional yang dilakukan oleh FNDC, dimana FNDC dalam demonstrasinya mengordinasikan

demonstrasi bersenjata publik, menggunakan kekerasan, menghasut kebencian, dan bertindak seperti “milisi swasta”, serta melakukan serangan terhadap individu yang berseberangan ideologi dengan mereka, serta melakukan serangan terhadap pasukan keamanan Guinea.

TRANSISI DEMOKRASI DI GUINEA PASCA KUDETA MILITER

Di Guinea, pemerintahan militer bukan berasal dari pemerintahan yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin, melainkan pemerintahan yang terbentuk berdasarkan reaksi terhadap pemerintahan sebelumnya yang dianggap gagal dalam menjalankan pemerintahan dan menegakan demokrasi. Afan Gafar dalam bukunya yang berjudul *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* mengatakan bahwa keberhasilan transisi demokrasi bergantung pada sejauh mana masyarakat dan negara mampu mengelola transisi dengan tidak menimbulkan akses yang berlebihan yang akan menyebabkan negara kembali pada keadaan semula yang tidak menentu bahkan munculnya anarkisme politik (Gaffar, 2006).

Awalnya pemerintahan militer mendapatkan dukungan dari rakyat Guinea atas kudeta yang dilakukan karena dianggap sebagai gerakan besar yang menghapuskan pemerintahan otoriter sebelumnya. Dalam pidatonya, kolonel Doumboya bersumpah akan memulihkan demokrasi dan memberantas korupsi yang endemik, selain itu pemerintah militer akan berusaha untuk memajukan ekonomi yang selama ini kurang bisa berkembang bahkan sejak Guinea merdeka dari Prancis. Junta mengklaim akan bertindak demi kepentingan dari 12,7 juta penduduk Guinea (Sakor et al., 2021).

Kegagalan demokrasi pada masa Alpha Conde belum mengalami perubahan kearah yang lebih baik pada masa pemerintahan militer, dalam artian pemerintah militer tidak mampu memberikan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat di Guinea. Dengan adanya intervensi militer, terjadi banyak protes dan pembungkaman publik yang dilakukan oleh pihak militer dalam menjalankan pemerintahannya. Ketidakterbukaan pemerintah militer dalam komposisi anggota-anggota *National Commite Rally for Development* (CNRD) juga menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya kepercayaan public terhadap pemerintah militer karena dianggap tidak transparan. Proses demokrasi di Guinea berada pada persimpangan antara kediktatoran sipil dan intervensi militer. Pemerintah yang ditunjuk oleh militer Guinea melakukan pembubaran terhadap kelompok oposisi utama yaitu NFDC, pihak pemerintah mengatakan pembubaran ini dilakukan karena adanya dugaan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh NFDC terhadap persatuan dan perdamaian nasional.

Menurut *Human Right Watch*, keputusan untuk membubarkan NFDC ini merupakan hal yang melanggar hak-hak demokratis, melanggar kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai yang ingin dibentuk di Guinea termasuk hak-hak yang dijamin dibawah hukum has asasi manusia internasional dan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi di Guinea pada tahun 1978 serta Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat (Human Rights Watch, 2022). Tuduhan pemerintah tidak jelas dan mengatakan bahwa NFDC tidak diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan badan peradilan independen. Pembubaran NFDC ini terajadi 11 bulan setelah kudeta dan niat dari junta untuk membentuk pemerintahan yang lebih demokratis (Hammerschlag, 2023).

Hungtinton menjelaskan bahwa dalam transisi demokrasi untuk mencapai kestabilan dan prospek konsolidasi maka harus didukung oleh (1) Pengalaman dari upaya demokratisasi, bahkan meskipun itu gagal sekalipun; (2) Tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi; (3) Lingkungan politik internasional yang menguntungkan; (4) Pengaturan waktu awal transisi demokrasi yang relative stabil, yang menunjukkan bahwa dorongan menuju demokrasi terutama berasal dari masyarakat dalam negeri; dan (5) Pengalaman transisi yang relative damai tanpa kekerasan (Nurhadi, 2020).

Berdasarkan pandangan dari Hungtinton, transisi demokrasi di Guinea telah gagal, karena tidak memenuhi syarat-syarat dari terjadinya transisi demokrasi. Pengalaman dan upaya demokratisasi yang dilakukan sebelumnya oleh Alpha Conde telah gagal dikarenakan Alpha Conde tidak mampu memenuhi janjinya dan banyak melakukan pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan berlebih, kecurangan dalam pemilu, dan lain sebagainya. Guinea juga merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah, meskipun Guinea merupakan penghasil Bauksit terbesar di dunia, akan tetapi pengelolaannya tidak memeberikan hasil yang baik kepada warga negaranya, kemiskinan masih merajalela dan banyak yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan.

Lingkungan politik di Afrika Barat juga tidak menguntungkan Guinea, banyak dari negara-negara di sekitar Guinea yang nasibnya tidak jauh berbeda dengan Guinea. Krisis kemanusiaan besar terus terjadi, guncangan iklim, kerawanan pangan, kudeta, dan terorisme yang memperpanas politik di kawasan Afrika Barat. Pengaturan waktu transisi yang dilakukan oleh pemerintah militer dibantu oleh parntai-partai utama di Guinea tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sipil, dimana pemerintah militer menjanjikan peralihan dalam kurun waktu paling cepat dua tahun, sementara masyarakat menginginkan peralihan dilakukan lebih cepat untuk mencegah militer mendominasi pemerintahan sipil. Transisi demokrasi diiringi dengan kekerasan, masyarakat yang melakukan protes dihadapi dengan keras oleh pihak militer sehingga banyak dari masyarakat yang meninggal, terluka, dan dipenjara.

PROTES TERHADAP PEMERINTAHAN MILITER DI GUINEA

Awal Alpha Conde digulingkan oleh militer, warga berbondong-bondong turun ke jalan untuk merayakannya. Masyarakat Guinea sangat berharap dengan adanya kudeta militer ini akan melihat perdamaian dan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, konflik terus terjadi dan berulang kembali. Demonstrasi rakyat yang khawatir pihak militer terlambat memulihkan pemerintahan sipil pecah pada tanggal 28 dan 29 Juli 2022, dalam demonstrasi ini menyebabkan lima warga sipil tewas.

Terjadi bentokan antara masyarakat dan *Nation Front for the Defense of the Constitution* (NFDC) dengan pasukan keamanan, masyarakat dan NFDC melakukan unjuk rasa untuk menuntut pengembalian pemerintahan sipil dengan cepat dan pembebasan semua tahanan yang ditahan karena alasan politik, serta menganggap kurangnya dialog yang kredibel dalam pembentukan pemerintahan sipil transisi, bentokan ini menyebabkan empat warga sipil tewas (France24 English, 2022). Pemerintah yang ditunjuk oleh militer Guinea melakukan pembubaran terhadap kelompok oposisi utama yaitu NFDC, pihak pemerintah mengatakan pembubaran ini dilakukan karena adanya dugaan kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh NFDC

terhadap persatuan dan perdamaian nasional. Akan tetapi langkah ini dikecam oleh kelompok HAM dan kritikus di Guinea karena keputusan ini mengancam kembalinya Guinea ke pemerintahan yang demokratis (Hammerschlag, 2023).

Rakyat menuntut pemerintah militer Guinea untuk membatalkan pembubaran FNDC dan mengakhiri campur tangan partai oposisi dan masyarakat sipil. Masyarakat mengatakan bahwa pemerintah transisi tidak mampu mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan supermais hukum. Masyarakat juga mengatakan, rezim apapun yang berkuasa tidak akan terlalu banyak merubah nasib Guinea. Negara akan tetap terbagi dalam berbagai kelompok yang akan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan dan akses menguntungkan pada sektor pertambangan. Hal ini kemudian yang menyebabkan pemberontakan dari rakyat akan terus berlanjut yang melihat kekayaan mineral negara yang terkuras tanpa banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Buruh, pemuda, dan rakyat kecil harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak mendukung rezim (Al Jazeera, 2021).

RELASI SIPIL-MILITER PASCA KUDETA MILITER 2021 DI GUINEA

Berdasarkan teori praetorian, apa yang terjadi di Guinea merupakan contoh dari dominasi militer sebagai aktor yang sangat dominan dalam politik Guinea. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori praetorian, bahwa prajurit militer mengambil peran yang dominan didalam semua instansi yang penting dalam politik, termasuk pemimpin politik. Kudeta militer yang di pimpin oleh kolonel Doumbouya pada tahun 2021 ini mengakibatkan pihak militer terlibat dan mengintervensi urusan sipil yang seharusnya bukan ranah dari militer.

Kekuatan militer di Guinea meningkat, dimana yang berlawanan dan melakukan protes terhadap pemerintahan militer maka akan disingkirkan, seperti pembubaran NFDC, pembungkaman publik dan kekerasan yang terjadi selama protes yang dilakukan oleh masyarakat Guinea. Dengan kekuatannya yang dimilikinya ini militer mampu menggulingkan pemerintahan Alpha Conde melalui kudeta, kemudian membentuk pemerintahan transisi, membentuk TNC, melakukan pembubaran terhadap NFDC, dan menjalankan pemerintahan sementara. Akan tetapi pemerintahan militer mengalami hambatan dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengalaman militer dalam urusan politik sehingga mempersulit terwujudnya pemerintahan yang lebih baik secara cepat.

Berdasarkan jenis praetorianya militer di Guinea masuk dalam kategori *Arbitor army*, dimana kolonel Doumbouya yang memimpin kudeta ditunjuk sebagai pemimpin sementara sebelum pemerintahan dikembalikan kepada tangan sipil dalam kurun waktu dua tahun, dengan kata lain, kudeta dilakukan untuk transisi pemerintahan yaitu untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik dengan diadakannya pemilu dan tidak ada satupun pihak militer yang akan terlibat untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden di Guinea seperti yang telah dikemukakan oleh Amos Parlmuter.

Militer disini juga bertindak sebagai Praetorian pengawal yang merupakan mereka yang memiliki wewenang di ranah pemerintahan untuk sementara yang umumnya selama dua sampai empat tahun, dimana setelah mereka berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yaitu pemerintahan Alpha Conde, maka mereka akan menjadi penguasa untuk sementara sebelum adanya pemerintahan transisi.

Penggulingan kekuasaan ini mereka lakukan karena tidak adanya golongan elit politik yang dianggap mampu untuk mempertahankan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi.

Militer merasa yakin bahwa tujuan-tujuan pembangunan negara yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila mereka sendiri yang menguasai pemerintahan sehingga mereka perlu untuk mengganti pemerintahan sipil. Pemerintahan militer mencoba untuk meningkatkan kemampuan untuk mengubah arah kebijakan pemerintahan sebelumnya, dan sebagian di antaranya cenderung melakukan perubahan sosial ekonomi dalam ukuran yang sangat minimal seperti yang telah di definisikan oleh Nordlinger.

Elit sipil di Guinea terbagi menjadi dua kelompok, pertama yaitu partai-partai utama Guinea ANAD, BOC, CPA, CPR, dan COREDE yang mendukung dan membantu militer dalam membentuk pemerintahan sipil seperti pembentukan *National Commite Rally for Development* (CNRD) untuk membuat keputusan politik. CNRD kemudian membentuk badan legislatif sementara, Dewan Transisi Nasional (CNT), dan sejumlah lembaga transisi lainnya. Anggota dari Dewan Transisi Nasional (CNT) dipilih oleh kolonel Doumbouya dari daftar yang diajukan oleh partai politik dan asosiasi, yaitu untuk menyusun konstitusi baru dan menyarankan tanggal untuk peralihan ke pemerintahan sipil. Sementara itu, pemerintahan dan lembaga yang lama telah dibubarkan seperti menteri, gubernur, dan prefek diganti dengan administrator dan tentara (Agence France, 2022).

Relasi yang dibangun oleh pemerintahan militer dengan partai-partai utama Guinea ini masuk pada kategori positif, dimana kedua belah pihak bekerjasama untuk membentuk pemerintahan baru yang lebih baik daripada sebelumnya dengan membentuk Dewan Transisi Nasional yang bertugas untuk mengatur peralihan pemerintahan dan membantu pemerintahan militer dalam menjalankan kekuasaan semmentaranya dan untuk memenuhi janji memperbaiki berbagai permasalahan seperti kemiskinan, korupsi yang endemik, pengelolaan sumber daya alam, dan demokrasi yang lebih baik.

Kedua yaitu *National Front for the Defense of the Constitution* (NFDC) NFDC menentang pemerintahan militer dan melakukan banyak protes yang puncaknya terjadi pembubaran terhadap NFDC oleh pemerintah militer. NFDC merasa bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh militer tidak membawa hasil yang baik terhadap pemerintahan di Guinea dan mendesak agar militer segera mengembalikan pemerintahan ke tangan sipil, selain itu NFDC juga menyerukan dialog yang kredibel antara pemerintah militer dan partai oposisi maupun masyarakat, serta melihat banyaknya kekerasan yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah militer terhadap masyarakat di Guinea selama pemerintahannya.

Relasi yang dibangun oleh pemerintahan militer dengan elit sipil NFDC masuk dalam kategori negatif, dimana penentangan dan pembubaran dari NFDC ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi dan pembungkaman hak publik untuk menyuarakan pendapat serta kekerasan yang terjadi selama demonstrasi dan protes. Penentangan oleh NFDC dan protes dari masyarakat terhadap pemerintah militer ini menunjukkan adanya ketegangan relasi sipil militer di Guinea meskipun pemerintah militer membangun hubungan baik dan mendapatkan dukungan dari partai-partai utama di Guinea.

Pemerintahan junta militer yang menyelenggarakan pemilu juga dikhawatirkan hanya sebagai pemberian legitimasi kepada pemerintahan militer sementara dan untuk meyakinkan masyarakat internasional mengenai peran politik dari militer untuk periode dua tahun ini. Posisi-posisi politik yang diambil alih oleh pihak militer dari rezim Alpha Conde memiliki kemungkinan besar menjadi lahan perebutan kekuasaan oleh pihak militer untuk kepentingan pribadinya (Sakor et al., 2021)

Terjadi ketegangan internal juga dalam partai-partai politik yang bertugas untuk membantu pemerintahan militer dalam menjalankan pemerintahan sementara, dimana proses transisi ke pemerintahan sipil mendapat pro dan kontra dari kubu demokrasi. Oposisi demokratis diorganisir ke dalam beberapa kelompok dan termasuk tujuh partai utama dan independen yaitu ANAD, COREDE, COPED, CARP, BOC, CPR, DAN CPA. Terdapat persaingan antara mereka, termasuk dalam pemilihan 15 wakil partai untuk Dewan Transisi Nasional (CNT) (Benedikter, 2021).

Pembentukan pemerintahan transisi dengan model praetorian pengawas atau *Arbitorator army* oleh pihak militer pasca kudeta menjadi tantangan baru di Guinea. Reformasi dan perubahan yang salah oleh militer akan menimbulkan konsekuensi yang besar bagi masa depan politik dan pemerintahan sipil di Guinea. Pembentukan pemerintahan transisi memerlukan banyak kekuatan dan kemampuan karena akan menghadapi berbagai tantangan teknis, mendefinisikan kembali hubungan angkatan bersenjata dengan kekuatan sipil dan mengatasi masalah kritis pembiayaan militer untuk menciptakan angkatan bersenjata yang profesional, disiplin, dan efektif (Peace and Security Council Report, 2021).

Poin utama penyebab dari kudeta militer ini ialah kebijakan pemerintahan sipil yang bertindak otoriter dan tidak merangkul pihak militer dalam kebijakan-kebijakannya selama bertahun-tahun sehingga pergerakan dari militer sangat terbatas, selain itu banyak sekali tuduhan tanpa bukti yang dilakukan oleh Alpha Conde terhadap perwira-perwira militer yang semakin membuat relasi sipil militer menjadi panas, kemudian isu sosial dan perlawanan dari masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Alpha Conde menjadi batu loncatan pihak militer untuk melakukan kudeta militer dimana puncaknya ialah pada saat Alpha Conde mengubah amandemen yang memungkinkan dia menjabat selama 3 periode pada tahun 2020.

Terdapat resiko bahwa setelah militer membentuk pemerintahan sipil transisi, pihak militer akan bersedia untuk melepaskan kekuasaan formalnya dipemerintahan namun tetap ingin mempertahankan pengaruhnya yang signifikan di balakang layar dan pada akhirnya akan menolak untuk patuh pada pemerintahan sipil dalam isu-isu tertentu terutama kebijakan pertahanan dan tipe pretoriannya akan berubah menjadi praetorian *The Ruler Army* dimana pemerintahan militer akan berkuasa selamanya dan menguasai rezim, argumen ini berdasarkan pada pola-pola kepemimpinan pemerintahan militer sementara yang melakukan banyak pelanggaran di Guinea seperti pembungkaman publik, penanganan protes dengan cara-cara kekerasan, kegagalan tercapainya konsolidasi demokrasi, pemilu yang belum terselenggara, dan keyakinan dari militer bahwa tujuan-tujuan pembangunan negara akan lebih baik dan lebih mudah dicapai apabila mereka sendiri yang menguasai pemerintahan sehingga perlu untuk mengganti pemerintahan sipil.

Hal ini menguatkan bahwa tipe praetorian baik *Arbitrator Army* maupun *The Ruler Army* dapat menjelaskan bagaimana bentuk kekuasaan militer yang ada di

Guinea pasca kudeta militer baik di awal terjadinya kudeta militer maupun setelah pembentukan pemerintahan sementara oleh militer, serta bagaimana relasi sipil-militer yang dibangun oleh pemerintahan sementara yang menunjukkan bahwa militer memberikan dukungan kepada partai-partai politik yang membantu dalam pembentukan pemerintahan baru dan membubarkan kelompok sipil yaitu NFDC yang berlawanan dengan pemerintahan sementara.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kudeta militer di Guinea terjadi sebagai respon dari buruknya relasi sipil militer pada masa pemerintahan Alpha Conde yang mengeluarkan kebijakan dimana pihak militer merasa tidak dirangkul dengan pemotongan anggaran militer dan pembatasan pergerakan militer oleh sipil, selain itu kudeta terjadi karena ketidakpuasan militer terhadap pemerintahan sipil yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Guinea seperti korupsi yang endemik, kemiskinan, konflik etnis, dan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif.

Intervensi militer yang dipimpin oleh kolonel Doumbouya terhadap pemerintahan sipil di Guinea termasuk pada tipe praetorian *Arbitor army* yang dikemukakan oleh Amos Parlmutter dan tipe praetorian pengawas seperti yang dikemukakan oleh Nordlinger, dimana tipe *Arbitor army* dan tipe pengawas ini memiliki definisi yang sama yaitu intervensi sementara oleh pihak militer sebelum dikembalikan kepada pihak sipil yang akan menjalankan pemerintahan permanen. Kolonel Doumbouya menjanjikan pemerintahan militer sementara ini akan berlangsung selama dua tahun yaitu sampai 25 April 2023 berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak partai politik dan organisasi regional yaitu Uni Afrika dan Ecowas. Dalam pemerintahan sementara ini, pemerintah militer membentuk lembaga yang akan membantu dalam pemerintahan transisi yaitu *National Transitional Council (CNT)*.

Elit sipil di Guinea terbagi menjadi dua, yaitu partai-partai politik Guinea dan NFDC yang menyebabkan Relasi sipil-militer di Guinea pasca kudeta militer pada tahun 2021 terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Koalisi oleh partai-partai besar Guinea kubu oposisi oleh NFDC. Relasi antara pemerintah militer dengan partai-partai utama Guinea masuk pada kategori relasi positif karena kedua pihak bekerjasama dalam upaya membentuk pemerintahan transisi yang baik dimana partai-partai politik memberikan dukungan dan bantuan terhadap pemerintahan militer yang kurang berpengalaman serta kurang pengetahuan dalam menjalankan urusan pemerintahan.

Relasi antara pemerintahan militer dengan NFDC masuk pada kategori relasi negatif karena kedua pihak berada pada posisi yang berseberangan, NFDC mengkritik pemerintah militer karena dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mendesak pengembalian pemerintahan kepada pihak sipil untuk lebih cepat. Militer kemudian membubarkan NFDC sebelum NFDC pada tanggal 13 Agustus 2022 karena menganggap NFDC akan mengancam keamanan nasional dengan menghasut masyarakat dan tindakan kekerasan lain seperti milisi swasta di Guinea.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa janji dari kolonel Doumbouya untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya tidak tercapai karena pembubaran NFDC mencerminkan adanya pembungkaman terhadap hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, serta

pembungkapan media oleh pemerintahan militer di Guinea dan penanganan masyarakat yang melakukan protes yang dilakukan dengan cara kekerasan oleh pihak militer hingga menyebabkan banyak masyarakat yang tewas.

REFERENSI

- Agence France. (2022, February 5). *Guinea Interim Assembly Holds First Post-Coup Session*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/guinea-interim-assembly-holds-first-post-coup-session-/6429524.html#:~:text=Guinea's transitional assembly%2C which is,held its first session Saturday>.
- Al Jazeera. (2021, September 5). *Guinea in turmoil after military coup Guinea Africa*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/5/heavy-gunfire-heard-in-guinea-capital-conakry-witnesses>
- Bah, M. D. (2015). The Military and Politics in Guinea: An Instrumental Explanation of Political Stability. *Armed Forces & Society*, 41(1), 69–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0095327X13495391>
- BBC News. (2021, September 6). *Guinea coup: Profile of Colonel Mahamady Doumbouya wey use coup comot President Alpha Condé from power*. <https://www.bbc.com/pidgin/tori-58461178>
- Bell, S. R., Clay, K. C., Kiyani, G., & Murdie, A. (2022). Civil–Military Relations and Human Rights. *Armed Forces and Society*, 48(3), 701–722. <https://doi.org/10.1177/0095327X211006835>
- Benedikter, R. (2021, November 23). *Prospects for Guinean elections after the coup are uncertain Africa at LSE*. LSE Blogs. <https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2021/11/23/prospects-for-guinea-elections-democracy-after-coup-are-uncertain-conde/>
- Bertelsmann Transformation Index. (n.d.). *Guinea Country Report*. <https://bti-project.org/en/reports/country-report/GIN>
- Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 308–321. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.308-321>
- Deutsche Welle (DW). (2022, January 5). *Guinea coup leader plans shift to civilian rule*. <https://www.dw.com/en/guinea-coup-leader-says-transition-to-civilian-rule-will-take-over-three-years/a-61652388>
- Diallo, F. (2021, September 23). *Guinea: Alpha Condé succeeded in creating a 'Republican army.'* The Africa Report. <https://www.theafricareport.com/129212/guinea-alpha-conde-succeeded-in-creating-a-republican-army/>
- Foucher, V. (2011, October 17). *Guinea Briefing: Alpha Condé and the politics of military (mis)adventure*. African Arguments. <https://africanarguments.org/2011/10/guinea-briefing-alpha-conde-and-the-politics-of-military-misadventure-by-vincent-foucher/>
- France24 English. (2022, October 23). *Guinea Junta Agrees Return to Civilian Rule in 2 Years*. <https://www.france24.com/en/africa/20221023-guinea-junta-agrees-return-to-civilian-rule-in-two-years>
- Gaffar, A. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Garmabar, P. (2021). Respon Dunia Terhadap Kudeta Militer. *Review of International Relations*, 3(2), 179–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/rir.v3i2.25166>

- Ginting, J. S. (2003). Pretorian Dalam Perkembangan Politik Negara Berkembang. In *Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara*. https://www.researchgate.net/publication/42320934_Pretorian_Dalam_Perkembangan_Politik_Negara_Berkembang
- Hammerschlag, A. (2023, August 11). *Guinea's Military-appointed Government Dissolves Opposition Group*. VOA News. <https://www.voanews.com/a/guinea-s-military-appointed-government-dissolves-opposition-group-/6697881.html>
- Human Rights Watch. (2022, August 11). *Guinea Government Dissolves Opposition Coalition* Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/08/11/guinea-government-dissolves-opposition-coalition>
- Mahendra, R. A. (2021, September 7). *Kudeta Militer di Guinea: Sejarah Singkat Perpolitikan Guinea*. Harian Haluan. <https://www.harianhaluan.com/news/pr-101130346/kudeta-militer-di-guinea-sejarah-singkat-perpolitikan-guinea>
- Melly, P. (2020, October 15). *Guinea elections: The 82-year-old seeking six more years*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-africa-54532224>
- News Wires. (2022, August 9). *Guinea dissolves leading opposition group amid political unrest*. France24. <https://www.france24.com/en/africa/20220809-guinea-dissolves-leading-opposition-group-amid-political-unrest>
- Nordlinger, E. A. (1990). *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (S. Simamora (Trans.)). Rineka Cipta.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nurhadi, W. (2020). Review Essay: Gelombang Demokratisasi Ketiga. In *FISIP Universitas Padjajaran* (pp. 1–11). https://www.researchgate.net/publication/343360577_GELOMBANG_DEMOKRATISASI_KETIGA
- Peace and Security Council Report. (2021). Guinea transition falls foul of Africa's governance architecture. In *Institute for Security Studies*. <https://issafrica.org/pscreport/psc-insights/guinea-transition-falls-foul-of-africas-governance-architecture>
- Perlmutter, A. (1977). *The Military and Politics in Modern Times: On Professionals, Praetorians, and Revolutionary Soldiers*. Yale University Press.
- Perlmutter, A. (1984). *Militer dan Politik di Masa Modern* (S. Simamora (Trans.)). Rajawali Press.
- Praditya, I. (2021). The Residue of Military Regime During the Early Democratization Era in Indonesia and Myanmar. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 1(2), 72–79. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.12>
- Rahardjo, M. (2010, June 1). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif>
- Rofiq, A. A. (2015). Melacak Dinamika Sipil-Militer Pasca Revolusi Mesir. *Salam; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 2(1), 1–8. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/2244/pdf>
- Sakor, B. Z., Sacko, M., & Soko, V. (2021, October 7). *Military Coups d'État and Guinea's Rocky Road to Political Stability*. PRIO Blogs. <https://blogs.prio.org/2021/10/military-coups-detat-and-guineas-rocky-road-to-political-stability/>
- Schumpeter, J. (2012). *Capitalism, Socialism, and Democracy* (2nd ed.). Simon and

Schuster.

- Utama, A. C. (2010). *Perbandingan Kudeta 1987 dan 2006 di Fiji dalam Konteks Hubungan Sipil Militer* [Universitas Gadjah Mada].
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/121375>
- Widodo, P. W. (Ed.). (2021, September 15). *Militer Guinea memulai pembicaraan untuk siapkan transisi pemerintahan baru*. Kontan.
<https://internasional.kontan.co.id/news/militer-guinea-memulai-pembicaraan-untuk-siapkan-transisi-pemerintahan-baru>
- Zainal, N. A. (2013). Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a5>